

ABSTRAK

Program Sembako melalui E-Warong Jujur Sejahtera merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan sekaligus program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, Program Sembako melalui E-Warong Jujur Sejahtera sangat mengandalkan kecanggihan teknologi perbankan seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang harus diakses oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mitra E-Warong Jujur Sejahtera yang notabenenya belum sepenuhnya dapat dipahami oleh KPM yang berasal dari kalangan pendidikan rendah. Transfer *knowledge* mengenai transaksi & penggunaan mata uang digital menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam menyongsong Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan implementasi Program Sembako melalui E-Warong Jujur Sejahtera mempengaruhi KPM dalam mengakses bantuan Program Sembako di desa Keyongan. Selain itu tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana ekonomi politik dari sebuah pemberdayaan ekonomi melalui Program Sembako E-warong Jujur Sejahtera dilihat dari perspektif kritis berkaitan dengan ruang independensi kebijakan E-Warong. Tujuan terakhir dari penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi Program Sembako melalui E-Warong dari sisi humanisme atau sisi kemanusiaan yang dikorbankan dibalik sebuah model pembangunan ekonomi berbasis digital seperti halnya Program Sembako melalui E-Warong Jujur Sejahtera. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori *Dromologi* (percepatan) dari Paul Virilio, konsep Ekonomi Politik Pembangunan Charles K. Wilber, serta penggunaan konsep Peter L. Berger tentang Etika Politik, Perhitungan penderitaan dan peningkatan kesadaran dalam Pembangunan Ekonomi. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara secara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Sembako melalui E-Warong yang serba digital membawa KPM dan anggota E-Warong dalam *dromospheric space* atau ruang kecepatan yang mewajibkan kemampuan mengakses KKS dan mesin EDC demi sebuah bantuan sosial dengan dalih efisiensi (tepat harga, tepat jumlah, dan tepat waktu). Implikasinya adalah terjadi mal-administrasi, praktik endokolonisasi dan terciptanya sangkar besi yang bertolakbelakang dengan pedoman umum pelaksanaan Program Sembako. Masyarakat yang sebenarnya prematur dalam menerima digitalisasi dalam ruang bantuan sosial menjadikan Program Sembako melalui E-Warong secara ekonomi politik cenderung dimanfaatkan oleh beberapa kelompok demi mengejar keuntungan finansial, selain itu adanya regulasi lokal yang bersifat mengekang anggota E-Warong membuat ruang negosiasi anggota E-Warong dalam menjaga independensi E-Warong menjadi sangat terbatas. Berbagai upaya negosiasi oleh anggota E-Warong seperti permintaan kebebasan menentukan harga, menentukan jadwal penyaluran dan logistik sudah dilakukan oleh anggota E-Warong namun tidak terakomodir dengan baik oleh pemangku kebijakan. Terlepas dari bantuan logistik sembako yang diterima lebih baik dari bantuan sebelumnya (Rastra), namun ironinya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Sembako cenderung mengeksploitasi dan mereduksi sisi kemanusiaan seperti hilangnya sisi makna dan kesadaran dari KPM dan anggota E-Warong dalam memaknai tujuan Program Sembako sebagai pemberdayaan ekonomi berbasis digital.

Kata Kunci: Program Sembako, E-Warong, Dromologi, Ekonomi politik, Biaya Penderitaan manusia, Makna.

ABSTRACT

Program Sembako through E-Warong Jujur Sejahtera is one of the flagship programs of the Indonesian government to overcome poverty as well as a community economic empowerment program. In practice, the Program Sembako through E-Warong Jujur Sejahtera relies heavily on the sophistication of banking technology such as the prosperous family card (KKS) and Electronic Data Capture (EDC) machines that must be accessed by Beneficiary Families (KPM) and E-Warong Jujur Sejahtera partners whose facts are not fully understood by KPM who come from low education. Transfer of knowledge about transactions & the use of digital currency is one of the government's goals in welcoming the Cashless National Movement (GNNT).

This study aims to analyze changes in the implementation of the Program Sembako through E-Warong Jujur Sejahtera affecting KPM in accessing Program Sembako assistance in Keyongan village. In addition, the purpose of this research is to see how the political economy of an economic empowerment in Program Sembako through the E-warong Jujur Sejahtera is seen from a critical perspective related to the E-Warong policy independence space. The last goal of this research is to see how the implementation of the Program Sembako through E-Warong from the side of humanism or the human side that is sacrificed behind a digital-based economic development model such as the Program Sembako through E-Warong Jujur Sejahtera. The data obtained in this study were analyzed using Paul Virilio's Dromology (acceleration) theory, Charles K. Wilber's Political Economy of Development concept, as well as the use of Peter L. Berger's concepts of Political Ethics, Calculation of suffering and awareness raising in Economic Development. The method in this research uses qualitative using a case study approach. This research uses data collection techniques in-depth interviews, observation, and documentation studies.

The result of this research is that the implementation of Program Sembako through E-Warong which is all digital, bringing KPM and E-Warong members into a dromospheric space or speed space, where they are required to be able to access KKS and EDC machines for social assistance under the pretext of efficiency (right price, right quantity, and right time). The implication is that mal administration, endocolonial practices and the creation of an iron cage contradict the general guidelines for the implementation of the Program Sembako. People who are premature in accepting digitalization in the social assistance space make the Program Sembako through E-Warong in the political economy tend to be used by several groups in pursuit of financial gain, besides the existence of local regulations that are restrictive on E-Warong members, making the negotiation space for E-Warong members in maintaining the independence of E-Warong very limited. Various negotiation efforts by E-Warong members such as requests for freedom to determine prices, determine distribution schedules and logistics have been carried out by E-Warong members but are not well accommodated by policy makers. Apart from the basic food logistics assistance received which is better than the previous assistance (Rastra), the irony is that community economic empowerment through the Program Sembako tends to exploit and reduce the human side such as the loss of meaning and awareness of KPM and E-Warong members in interpreting the purpose of the Program Sembako as digital-based economic empowerment.

Keywords: *Program Sembako, E-Warong, Dromology, Political Economy, Cost of human suffering, Meaning.*